

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI SULAWESI TENGAH

**Andi Rifai**

andi58rifai@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

## **Abstract**

*The problem that often occurred in the implementation of early childhood education (ECE) was there were still many ECE apparatuses and institutions that were not aware of the ECE policy, so this study aimed to analyze the implementation of early childhood education policy in Central Sulawesi and it was expected to provide an overview of the implementation of the ECE policy. This study used qualitative research to find out the facts and phenomena that occurred associated with the implementation of the ECE policy. The author used the indicators of Edward III, namely: communication, implementer attitude, resources, and bureaucratic structure. Informants in this study were those deemed to know and be involved in the policy implementation. Data used were primary data which was obtained directly from the informants and secondary data which was obtained indirectly. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis consisted of three phases: data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that the implementation of the ECE policy in Central Sulawesi had not been optimal: from Communication aspect, there were still officials who did not know the contents of the ECE policy; from Attitude aspect, there was still discrimination from the employees; from Resources aspect, there were apparatus resources of Central Sulawesi Department of Education and Culture particularly of the Early Childhood, Non-Formal, and Informal (Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Informal – PAUDNI) Division who had skills and reliabilities, but not all had the same opportunity to be a reliable employees, although there were facilities provided by the Department. While its bureaucracy structure had been very good, but there were still employees who were not aware of their duties and functions as shown at the bureaucracy structure board.*

**Keywords:** Policy Implementation, Early Childhood Education

Undang - Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini memegang posisi yang sangat mendasar, karena pendidikan pada masa ini memberikan pengaruh yang sangat membekas pada perkembangan anak di fase-fase selanjutnya. Karena itu pendidikan anak usia dini perlu mendapatkan perhatian yang

sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Anak usia dini (early childhood) yang berusia 0-8 tahun merupakan usia emas (golden age). Istilah itu digunakan karena pada usia tersebut daya serap anak sangat

tinggi sehingga pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat esensial. PAUD sangat menentukan pertumbuhan struktur dan fungsi otak anak sehingga dapat memberikan pengaruh yang menetap terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian anak selanjutnya. Selain itu, pendidikan yang berorientasi pada perkembangan memungkinkan pendidik untuk merencanakan berbagai pengalaman yang dapat menumbuhkan minat anak usia dini dan merangsang keingintahuan mereka. Dengan demikian PAUD merupakan investasi yang sangat besar bagi keluarga dan bangsa (Suyanto, 2005:2). Pembelajaran PAUD selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Sementara penanaman sejak dini tentang rasa kebangsaan seringkali terlupakan. Padahal PAUD merupakan sarana yang efektif guna membangun dan memupuk jiwa nasionalisme generasi muda sejak dini.

Hal ini dapat diamati dari standar kompetensi yang terdiri atas pengembangan aspek - aspek sebagai berikut. (Diknas, 2007)

- a. Moral dan nilai-nilai agama
- b. Sosial, emosional, dan kemandirian
- c. Bahasa
- d. Kognitif
- e. Fisik/Motorik
- f. Seni

Standar kompetensi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang berorientasi rasa kebangsaan - nasionalisme belum menjadi perhatian nasional sistem pendidikan PAUD. Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat ini, tim PPM berusaha untuk membenahi tema pembelajaran agar mengandung nilai - nilai kebangsaan Indonesia. Melalui pengenalan terhadap bangsa dan negaranya sejak dini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa

memiliki, rasa bangga, dan rasa mencintai yang kuat terhadap bangsa dan Negara Indonesia. Model pendidikan berwawasan kebangsaan yang akan diterapkan oleh tim PPM ini adalah mengenalkan pada anak mengenai karakteristik bangsanya dalam berbagai aspek, baik adat, budaya, alam, maupun sejarah kepahlawanan. Hal yang dipertanyakan kemudian adalah bagaimana mengajarkan pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini secara efektif ? Bruner menyatakan bahwa setiap materi dapat diajarkan kepada setiap kelompok umur dengan cara - cara yang sesuai dengan perkembangannya. Pada anak usia dini, cara - cara yang paling sesuai adalah melalui berbagai permainan. Permainan anak sebenarnya mengacu pada kebersamaan gotong royong, berteman, dan mengurangi rasa ego anak. (Andriani - Eriefa, 2010).

Merujuk pernyataan Bruner, pengenalan anak mengenai karakter bangsanya perlu dikemas melalui permainan yang dipadukan dengan tema - tema pendidikan PAUD. Aplikasi sistem pembelajaran terpadu menjadikan pembelajaran tidak membutuhkan tambahan jam pelajaran. Oleh karena itu, perlu dipikirkan teknik pengemasan materi pembelajaran melalui aneka permainan menarik sehingga mudah diserap oleh anak. Dalam aplikasi pembelajaran tersebut, media penunjang berupa alat - alat permainan, kaset/CD, dan gambar - gambar juga diperlukan. Selain sebagai sarana belajar, permainan juga harus mampu membangun pertemanan di antara anak - anak sehingga proses humanisasi anak - anak terbangun dengan baik. Urgensi PAUD sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi peningkatan kualitas anak. Anak yang mendapat pelayanan PAUD akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya hubungan pengembangan PAUD dengan peningkatan kualitas perkembangan anak sangat erat. Permasalahannya kemudian

bergeser pada upaya bagaimana caranya agar kegiatan dan aktivitas penyelenggaraan PAUD yang ada dapat dilaksanakan secara maksimal. Bagaimana secara bersama-sama antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat bisa melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama agar niat untuk mempersiapkan dan mendidik anak-anak usia dini bisa dilakukan secara optimal dan lebih maksimal. Sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Sulawesi Tengah.”

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi.
- 2) Sumber daya
- 3) Sikap Pelaksana
- 4) Struktur birokrasi.

## METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai ‘Natural inquiry (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial), atau Interpretive inquiry (karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek peneliti itu sendiri)’.

Informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive terdiri dari aparat/pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kepala Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si, Kepala Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Dikmas Bidang PAUDNI Effendi Sipanawa, S.Sos, Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI Risna, S.Ag, Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI Ni Wayan Sani, S.Sos, Staf Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI Drs. Latif Londjung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu untuk mencatat persepsi dan opini informan berkaitan dengan masalah-masalah/fenomena penelitian.
2. Observasi, dilakukan untuk menunjang kevalidan informasi yang diperoleh melalui wawancara,
3. Dokumentasi, merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan fokus penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Reduksi Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi direduksi dengan memberikan kode dan memilah semua informasi baik dari data sekunder maupun primer kepada aspek-aspek tertentu dan diharapkan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

### 2. Display Data/Penyajian Data

Setelah data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkumpul dan direduksi peneliti kemudian mengolahnya dan menyusun menjadi suatu bentuk utuh yaitu tentang bagaimana mekanisme

Implementasi Kebijakan pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Sulawesi Tengah.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian disajikan kemudian ditarik benang merah dari seluruh pembahasan menjadi suatu kesimpulan yang menjawab pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan (the Golden Age), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Selain itu anak pada usia 2 sampai 6 tahun dipenuhi dengan senang bermain. Konsep bermain sambil belajar serta belajar sambil bermain pada PAUD merupakan pondasi yang mengarahkan anak pada pengembangan kemampuan yang lebih beragam, sehingga di kemudian hari anak bisa berdiri kokoh dan menjadi sosok manusia yang berkualitas. Indikator yang digunakan mengacu pada empat aspek sesuai dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu aspek:

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu lainnya.

Dalam ruang yang lebih rinci, komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa dan simbol-simbol tertentu kepada orang lain, sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika dalam penyampaian pesan didukung oleh adanya sumber pesan, pesan, media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini biasa juga disebut sebagai komponen komunikasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga harus memiliki komunikasi yang baik terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, dalam upaya penerapan kebijakan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, olehnya komunikasi tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna, pelaksana kebijakan tersebut dalam bentuk sosialisasi ataupun komunikasi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini, baik itu kepada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun kepada masyarakat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si tentang pemahaman pegawai bidang PAUDNI dengan adanya perda No 02 Tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

*“ Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ini sangat banyak khususnya yang di bidang PAUDNI sudah seharusnya tau akan adanya Peraturan Daerah No 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena itu merupakan pekerjaan di bidang kami.” (wawancara dilakukan pada 01 Desember 2015).*

Hal ini menggambarkan bahwa para aparatur atau pegawai harus tau dan paham apa yang ada dalam Perda No 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.

Menurut Kepala Seksi Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Dikmas Bidang PAUDNI Effendi Sipanawa, S.Sos, kebijakan – kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan berdasarkan atas Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh pemerintah berikut hasil wawancara dengan beliau :

*“Setiap kebijakan ataupun aturan yang baru dikeluarkan, kami berusaha untuk melaksanakan dan mensosialisasikan dengan Lembaga – lembaga PAUD yang terdaftar akan tetapi hanya beberapa Lembaga PAUD saja yang mengimplementasikannya, dan tidak hanya kepada lembaga – lembaga saja kami mensosialisasikan akan tetapi kepada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah seharusnya tau dan mengerti dengan Perda yang ada akan tetapi ada saja pegawai yang tidak mengerti dan paham akan hal tersebut.” (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2015)*

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah dilakukan akan tetapi pemahaman tentang isi dari perda tersebut yang masih kurang baik itu di lembaga – lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun di aparatnya sendiri.

Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan seperti Perda No 02 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini banyak hal yang harus dipenuhi seperti kebutuhan-kebutuhan yang mendukung terlaksananya Peraturan daerah tersebut, seperti yang diutarakan oleh Ni Wayan Sani, S.Sos, Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI.

*“ Dalam melaksanakan Peraturan daerah (PERDA) seharusnya kami ditunjang dengan pemahaman yang optimal tentang Perda tersebut agar supaya dalam memberikan keterangan kepada Lembaga-lembaga PAUD kami tidak memberikan keterangan yang salah dan agar supaya pemahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak hanya kami yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah saja yang tau.” (Wawancara dilakukan Tanggal 15 Desember 2015)*

Ini menunjukkan bahwa staf – staf yang ada di bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih mendalam agar mereka lebih paham dan mengerti tentang Perda penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

## **2. Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sikap aparat dalam memberikan informasi serta perlakuan kepada staf yang antara lain adalah sikap ramah, cepat dan tanggap serta menyajikan data hasil survey sesuai fakta lapangan. Keramahan dan kesigapan, dari para pelaksana kebijakan pada Pendidikan dan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat berpengaruh pada tanggapan atau respon masyarakat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang staf bidang PAUDNI yaitu dengan bapak Drs. Latif Londjung tentang perlakuan dari para pejabat kepada para staf dalam upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

*“ Alhamdulillah para pejabat disini semua baik dan memperlakukan kami seperti keluarga, hanya saja kadang – kadang kalau kerja kami tidak sesuai yang dengan yang beliau mau yah kami kena marah, namanya juga manusia apalagi dengan jabatan dan wewenang” (Wawancara tanggal 2 Februari 2016).*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa para pejabat di Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat baik dan ramah dalam penyampaian tugas, kebijakan dan peraturan yang ada. Akan tetapi para pemangku jabatan ini sangat menyukai staf yang handal, cakap, pandai, dan tanggap serta memiliki keahlian yang dapat diandalkan sehingga dalam suatu institusi baik itu pemerintah maupun swasta para staf yang memiliki keahlian, cakap, pandai akan menjadi kesayangan dari para pejabat.

Didalam melaksanakan pekerjaan kadang terjadi yang namanya diskriminasi antar pegawai dan hal ini juga terjadi di bidang Paudni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang di ungkapkan oleh ibu Ni Wayan Sani, S.Sos :

*“ Di sini kalau yang dipake hanya yang pintar dan yang dekat saja dengan para pejabat kalau yang hanya diam tidak di pake, kalau yang saya dengar katanya dari pada bikin habis uang negara lebih baik uangnya di pake untuk staf atau pegawai yang telah memiliki keahlian dan mau diatur.” (Wawancara Tanggal 05 Februari 2016).*

Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi antar pegawai dapat dilihat dari wawancara diatas di mana pegawai yang pintar dan memiliki keahlian saja yang selalu mendapatkan perhatian lebih, serta kesempatan dalam mendapatkan fasilitas dari kantor. Hal ini dapat menyebabkan penyaluran informasi tentang kebijakan hanya orang – orang tertentu saja yang paham dan mengerti karena disediakannya fasilitas untuk mengetahui segala bentuk kebijakan tersebut.

Didalam melaksanakan pendataan lembaga – lembaga PAUD yang ada di Sulawesi Tengah sudah seharusnya para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan survey langsung mengunjungi lembaga – lembaga PAUD yang ada di Sulawesi Tengah. Menurut Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si, bahwa:

*“ Melakukan survey sangatlah perlu agar dapat diketahui apa yang dibutuhkan oleh Lembaga PAUD dan kendala dalam melaksanakan Kebijakan - kebijakan Pemerintah seperti Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan didalam melakukan survey tersebut para petugas atau pegawai kami sangat diharamkan yang namanya menerima imbalan dari lembaga PAUD ” (Wawancara tanggal 01 Februari 2016)”*

Penuturan dari Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si, di atas menunjukkan bahwa data yang ada harus sesuai dengan data dilapangan, mengingat survey lapangan merupakan upaya untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini seperti yang tertera dalam Perda dapat di implementasikan secara baik. Serta di dalam melakukan survey tidak diperkenankan adanya pungutan baik dalam bentuk uang maupun barang. Dan pendataan secara langsung dilakukan agar tidak ada manipulasi data dari lembaga - lembaga PAUD yang ada di Sulawesi Tengah.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan Sikap Pelaksana Aparatur menunjukkan adanya sikap yang tegas akan tetapi sangat kekeluargaan sehingga dapat mengetahui kebutuhan dari para staf dan menyediakan fasilitas bagi para pegawai yang memang memiliki keahlian dan berusaha menjadikan pegawai tersebut handal dalam bidangnya, akan tetapi masih saja terjadi diskriminasi dalam memperlakukan pegawai/staf ini terbukti

dengan tidak meratanya kesempatan untuk mengikuti diklat – diklat PAUD serta pemberian fasilitas yang tidak merata antar sesama staf yang ada di Bidang PAUDNI.

### 3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya aparatur dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah adanya staf yang memadai, keahlian staf yang menunjang tugas-tugasnya, adanya wewenang yang dimiliki setiap staf dan tersedianya fasilitas yang menunjang. Serta perlakuan dari para pejabat dengan para staf yang ada pada bidang PAUDNI.

Penuturan dari Ibu Risna, S. Ag bahwa: *“Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami disediakan dengan fasilitas dari kantor misalkan komputer, Alat Tulis sampai dengan Biaya Perjalanan dalam melakukan pendataan Lembaga – lembaga PAUD yang ada Di Sulawesi Tengah.” (Wawancara Tanggal 05 Februari 2016)*

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Drs. Latif Londjung Staf Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI.

*“ Pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada kami akan selesai dengan baik apabila fasilitas untuk kerja pun disediakan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan segala keperluan untuk kelancaran pekerjaan yang kami lakukan.” (Wawancara Tanggal 08 februari 2016)*

Memiliki staf atau aparatur yang handal sesuai dengan harapan harus di dukung dengan fasilitas yang memadai di sediakan oleh kantor misalkan kebutuhan perlengkapan komputer, internet, dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si :

*“ Fasilitas yang kami sediakan sudah sangat memadai dari komputer, internet, macam – macam alat tulis sampai mengikutsertakan staf –staf kami untuk mengikuti Diklat – diklat tentang PAUD, hal ini kami lakukan agar supaya mereka dapat menjadi staf atau*

*apatur yang dapat di andalkan. ” (Wawancara tanggal 01 Februari 2016)*

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat memperhatikan stafnya agar dapat menjadi pegawai yang handal dan dapat diandalkan, akan tetapi handal tidaklah cukup tanpa keahlian maka sudah seharusnya para staf tersebut harus memiliki keahlian yang sangat baik di bidangnya misalkan dalam mengolah data, kemudian ahli dibidang programing, ahli di bidang tata bahasa dan lain sebagainya seperti yang di ungkapkan oleh ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si:

*“ staf - staf yang di ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memang tidak semua memiliki keahlian pada bidang tertentu akan tetapi dinas sangat memperhatikan kebutuhan staf - stafnya menjadi ahli dalam bidang tertentu.”(Wawancara Tanggal 01 Februari 2016).*

Ini menunjukkan bahwa fasilitas telah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi hanya segelintir staf yang bisa di andalkan karena memiliki keahlian di bidang koputer, administrasi, olah data, dan lain sebagainya. Seharusnya seluruh staf dapat menjadi ahli apabila memiliki rasa ingin belajar dan mau menjadi handal akan tetapi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidaklah demikian, khususnya di bidang PAUDNI.

Dari hasil keseluruhan wawancara diatas tentang Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi sulawesi Tengah khususnya Bidang PAUDNI adalah para staf di bidang Paudni banyak yang handal dan memiliki keahlian akan tetapi ada pula yang tidak memiliki keahlian. Fasilitas sebagai salah satu penunjang kesuksesan dalam suatu pekerjaan telah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah provinsi

sulawesi Tengah sebagai institusi yang menaungi Bidang PAUDNI, hanya saja diskriminasi masih ada di dalam pelaksanaan program – program kerja dari Bidang PAUDNI ini yang mengakibatkan kecemburuan bagi staf yang merasa tidak diperhatikan.

**4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi pada prinsipnya merupakan suatu gambaran akan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi. Melalui struktur organisasi akan diperoleh kejelasan mengenai batasan kewenangan, tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat didalam sebuah institusi.

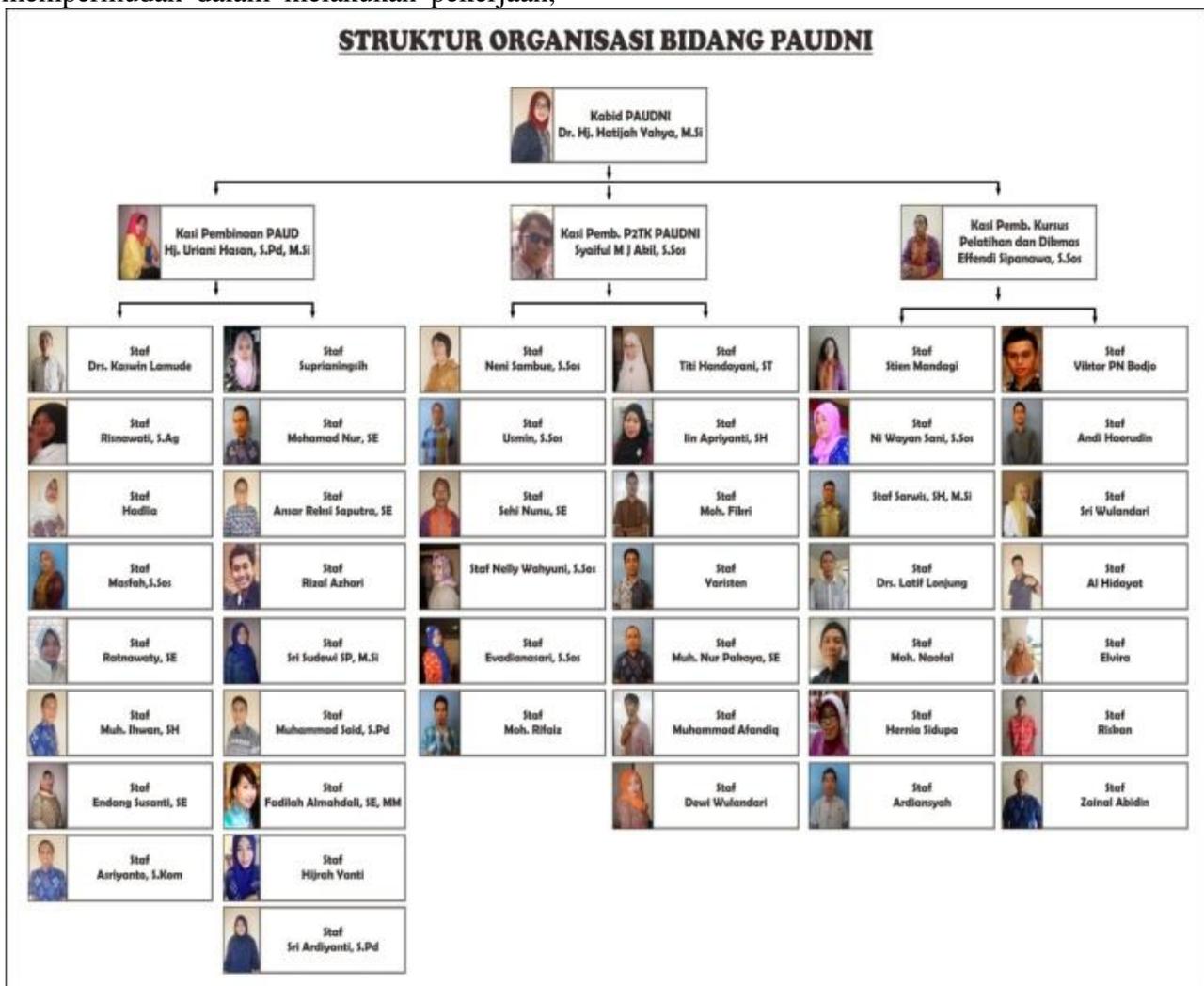
Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu media untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan,

menyelesaikan permasalahan yang timbul dan pengambilan keputusan atau kebijakan dengan medistribusikan tugas-tugas kepada setiap lini sesuai dengan tupoksinya.

Dalam wawancara dengan Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si tentang struktur birokrasi berikut ini bahwa :

“ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi tengah ini merupakan institusi besar karena itu sturktur birokrasinya pastilah ada sehingga kami bekerja sesuai tugas kami masing – masing baik itu pejabatnya maupun para stafnya, anda dapat melihat dari struktur yang ada di dinding ruangan kami.” (Wawancara Tanggal 20 Februari 2016).

Berikut gambar dari Struktur birokrasi yang ada di bidang PAUDNI



Dari gambar struktur birokrasi diatas menunjukkan bahwa setiap pegawai memang memiliki tempat dan kedudukan yang menjadikan para pegawai tersebut memiliki tugasnya masing - masing dan sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh atasan. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Effendi Sipanawa, S.Sos selaku Kepala Seksi Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Dikmas Bidang PAUDNI.

*“ Seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki tugas pokok dan posisi masing – masing sehingga kami mengetahui apa yang ahrus kami kerjakan seperti dalam mensosialisasikan setiap kebijakan yang ada, kalau di bidang kami kebijakan – kebijakan yang ada seperti kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.” (Wawancara Tanggal 28 Februari 2016).*

Senada dengan bapak Effendi Sipanawa, S.Sos Ibu Uriani Mengatakan bahwa

*“struktur birokrasi dibuat agar setiap pegawai tau akan tugas masing – masing dan hal ini dilakukan agar para pegawai atau aparatur yang ada di bidang kami dapat melaksanakan kerja seuai dengan fungsinya, ini sangat membantu dalam pembagian tugas agar tidak hanya menumpuk pada aparatur tertentu dan menurut saya pribadi struktur ini sangat membantu kelancaran kegiatan program kerja dari bidang kami karena masing – masing memiliki tugas dan fungsinya sebagai pegawai atau aparatur.” (Wawancara Tanggal 21 Maret 2016).*

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya struktur birokrasi di buat agar supaya dalam pembagian tugas semua apartur atau pegawai memiliki tanggung jawab akan pekerjaannya masing – masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan pada beberapa orang saja.akan tetapi melihat dari hasil wawancara sebelumnya bahwa yidak semua pegawai mengetahui tugas dan fungsi mereka

sehingga hanya beberapa saja yang dapat bekerja dengan baik.

Dalam pembagian kerja serta wewenang yang di berikan kepada pegawai atau aparatur haruslah sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab yang tinggi seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Pd, M.Si berikut ini :

*“ kami biasa mendapatkan tugas mewakili Kepala Bidang PAUDNI jika beliau lagi berhalangan sehingga pelimpahan wewenang terjadi apabila memang sudah harus dilakukan dan para pejabat diatas kami lagi tidak di tempat, seperti membuka suatu kegiatan sosialisasi PAUD,atau pun kegiatan dari program – program kerja kami yang lain.” (Wawancara Tanggal 21 Maret 2016).*

Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang di Bidang PAUDNI biasa terjadi akan tetapi tidak semua di berikan tanggung jawab tersebut hanya pegawai yang memiliki integritas tinggi, tanggung jawab yang baik serta yang amanah. Hal ini dapat membuat suatu program kegiatan ataupun kebijakan dapat teraksana sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak membuat penumpukkan pekerjaan serta informasi dapat disalurkan dengan baik dan sesuai rencana.

Mekanime dan prosedur kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang PAUDNI terlihat berjalan dengan baik dikarenakan terorganisirnya birokrasi didalamnya, sehingga tidak terjadi penumpukkan kegiatan program kerja dan terbukanya informasi kebijakan ataupun aturan yang ada untuk di ketahui oleh para pegawai dan lembaga – lembaga PAUD yang ada Di Sulawesi Tengah.

Dari hasil wawancara keseluruhan dari indikator Struktur Birokrasi adalah struktur birokrasi yang di bentuk merupakan wadah untuk tugas dan fungsi dari aparat atau pegawai yang ada di lingkunfgan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Derah Provinsi

Sulawesi Tengah khususnya di bidang PAUDNI serta pelimpahan wewenang untuk mengurangi penumpukkan pekerjaan serta untuk memberikan tanggung jawab kepada orang yang diberikan wewenang tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Suyanto Slamet,(2005). *Dasar – dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Hikayat Publishing. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta
- Bambang Sugono. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Considine. Mark. 1994. *Public Policy: A Critical Approach*. Melbourne: McMillan
- Djamalu Abdul Haris (2012),” *Implementasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi tengah*”.
- Dunn, William, N. 1994. *Public Polcy analysis*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Dye, Thomas R. 1995. *Undestanding Public policy*,New Jersey:Prentice Hall, Inc. Hall Publisher
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Dia Fisip UI, Depok
- Islamy Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung PT remaja Rostakarya.
- Nazir, Mohamad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2003.*KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta. Elex Media Komputindo
- Nurjanah 2012,” *Implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu*”.
- Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung
- PERDA nomor 02 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaanh dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Taha, Tjatjo, 2008, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis*, Untad Pres, Palu.
- Taha, Tjatjo, 2008, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis*, Untad Pres, Palu.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14
- Wahab Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.